



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Aziz bin Lawera, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal, di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Masnia binti Moh. Arsyad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 03 Februari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1971, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Moh. Arsyad yang akad nikahnya diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Yusuf Lamataiya dan dihadiri saksi nikah dua orang

Hal. 1 dari 8 halaman_Penetapan_No.019/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya masing-masing bernama: Lapaci (Almarhum) dan Lahamide (Almarhum) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :
 - 4.1. Arisman, umur 43 tahun (Almarhum);
 - 4.2. Bambang, umur 41 tahun;
 - 4.3. Azwar, umur 39 tahun;
 - 4.4. Mualim, umur 35 tahun;
 - 4.5. Akbar, umur 32 tahun;
 - 4.6. Irwan, umur 30 tahun;
 - 4.7. Dewi, umur 28 tahun;
 - 4.8. Moh. Rajab, umur 25 tahun;
 - 4.9. Moh. Rikit, umur 21 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 1971;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 8 halaman_Penetapan_No.019/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1971 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. **Lasala bin Hasan**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada tanggal 20 April 1971;

Hal.3 dari 8 halaman_Penetapan_No.019/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - o Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama Moh. Arsyad, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Yusuf Lamataiya;
 - o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lapaci dan Lahamide;
 - o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - o Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak;
 - o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum;
2. **Abd. Hamid bin Labaco**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersepupu dengan Pemohon II;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena keduanya belum pernah bercerai;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada tanggal 20 April 1971;
 - o Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - o Bahwa yang menjadi wali pada saat itu adalah orang tua Pemohon II yang bernama Moh. Arsyad yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Yusuf Lamataiya ;
 - o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lapaci dan Lahamide;

Hal.4 dari 8 halaman_Penetapan_No.019/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- o Bahwa status Pemohon I pada waktu akan menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 20 April 1971 di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Moh. Arsyad, yang akad nikahnya diwakilkan kepada imam Masjid yang bernama Lamataiyah dan dihadiri dua orang saksi nikah

Hal.5 dari 8 halaman_Penetapan_No.019/Pdt.P/2016/PA Dgl.



yang bernama Lapaci dan Lahamide, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lasala bin Hasan dan Abd. Hamid bin Labaco;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijskracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 1971 di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Moh. Arsyad, yang akad nikahnya diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Yusuf bin Lamataiya dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Lapaci dan Lahamide, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) tunai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 44 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (Abd. Aziz bin Lawera) dengan Pemohon II, (Masnia binti Moh. Arsyad) yang dilaksanakan pada

Hal.7 dari 8 halaman_Penetapan_No.019/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 April 1971, di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Dra. DJAWARIAH M. AMIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM TUNGGAL



NAHARUDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. DJAWARIAH M. AMIN



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	125.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)